PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Kedaulatan Rakyat Hari: Selasa Tanggal: 21 April 2015 Halaman: 6

VALIDASI PENERIMA PROGRAM BANTUAN

Libatkan Daerah Sinkronkan Data Warga Miskin

YOGYA (KR) - Mulai tahun ini, pemerintah di daerah akhirnya dilibatkan untuk melakukan sinkronisasi data warga miskin. Data tersebut untuk menjamin validitas rumah tangga sasaran untuk penerima bantuan dari pemerintah pusat.

Menurut Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta, Hadi Muhtar, selama ini sasaran program pemberian bantuan oleh pemerintah pusat mendasarkan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) dari Badan Pusat Statistik (BPS). "Misal jika terjadi perubahan data PPLS karena sudah tidak sesuai, ditetapkan melalui musyawarah kelurahan. Kami tidak terlibat," paparnya, Senin (20/4).

Namun karena kerap ditemui perselisihan data faktual, maka BPS mulai Mei mendatang akan melakukan survei ulang. Sedangkan pemerintah daerah pun mulai dilibatkan dalam hal sinkronisasi data. Oleh karena itu, sebelum data hasil survei warga miskin ditetapkan, BPS akan melimpahkan terlebih dahulu ke pemerintah daerah. Selanjutnya daerah mengkroscek apakah data hasil survei sudah benar secara faktual.

"Sistematika seperti ini bisa lebih menjamin validitas data. Karena bisa jadi, ada warga miskin yang pindah domisili namun tidak melaporkan," urai Hadi.

Sinkronisasi data warga miskin itu nantinya akan dijadikan acuan oleh pemerintah pusat. Terutama dalam pengucuran bantuan seperti jatah beras untuk warga miskin (raskin), Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) serta bantuan lain.

Hadi Muhtar menjelaskan, meski BPS melakukan pendataan warga miskin, namun program Kartu Menuju Sejahtera (KMS) di Kota Yogyakarta tetap digulirkan. Hal ini karena parameter yang dijadikan rujukan warga miskin oleh BPS, berbeda dengan Pemkot Yogyakarta. Apalagi, program KMS tidak semata warga miskin melainkan pula warga rentan miskin.

Khusus pendataan KMS, ditargetkan pada Juni mendatang sudah digelar uji publik tahap pertama untuk calon penerima tahun 2016. Setiap pemegang KMS berhap mendapatkan dana santunan kematian, jaminan pendidikan, kesehatan serta prioritas sasaran program pembinaan. **(Dhi)-k**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005